



**SUMBER BERITA**

**SELASA, 09 JULI 2019**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Anggota Dewan Minta LHP BK**

**BENTENG, BE** - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Indra Utama SE meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut Indra, LHP BPK merupakan salah satu hal yang penting bagi anggota DPRD Kabupaten Benteng sebagai bahan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemda Benteng.

"Dengan adanya LHP dari BPK, kami bisa menelaah apa yang telah dilakukan oleh OPD. Kami juga ingin tahu, kegiatan atau penggunaan anggaran dimana yang menjadi suatu permasalahan atau temuan BPK," kata Indra.

Yang terjadi saat ini, lanjut Indra, para anggota DPRD Kabupaten Benteng sama sekali tak mengetahui mengenai teknis apa yang dilakukan oleh OPD dalam merealisasikan anggaran.

Padahal, penetapan anggaran bermula dari kesepakatan dan pembahasan antara pihak eksekutif (Pemda) dengan pihak legislatif (DPRD).

"Kami harap ke depan LHP BPK juga disampaikan kepada kami. Sehingga, kami bisa menjadikan hal itu sebagai informasi penting dalam penentuan keputusan. Jangan sampai, penyalahgunaan anggaran tahun sebelumnya kembali terjadi pada penganggaran tahun berikutnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan, keterbukaan antara Pemda Benteng dan DPRD Kabupaten Benteng diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan prestasi yang membanggakan. Salah satunya adalah dengan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan dari BPK RI. "Dengan melakukan koreksi secara mendalam terhadap setiap penggunaan anggaran, kami yakin penggunaan anggaran bisa lebih membaik. Harapannya adalah predikat WTP yang sejak 3 tahun terakhir lepas bisa kembali diraih," harapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Benteng, Tarmizi SSos mengungkapkan bahwa LHP BPK memang tak diserahkan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Benteng, melainkan kepada Kepala Daerah (Bupati), Ketua DPRD Kabupaten Benteng dan Inspektorat.

"Memang tak diserahkan kepada semua anggota. Dewan sudah diwakili oleh pimpinan. Tak mungkin LHP disebar kemana-mana," kata Tarmizi. (135)